



## **GUBERNUR JAWA TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 89 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**BAGI HASIL BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEPADA  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2006**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 68);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 10 Seri A Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG BAGI HASIL BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2006.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Bagi Hasil yang diberikan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berasal dari Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

**Pasal 2**

Besarnya Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**Pasal 3**

Besarnya Alokasi Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 4**

Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah yang diberikan kepada Kabupaten/Kota, agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

**Pasal 5**

- (1) Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tatacara penyaluran Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**Pasal 6**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Oktober 2006

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 31 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH,**

ttd

**MARDJIJONO**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 89**

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 89 TAHUN 2006  
 TANGGAL 20 OKTOBER 2006

ALOKASI BAGI HASIL BEA BALIK NAMA KENDARAAN  
 BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/KOTA  
 DI PROVINSI JAWA TENGAH  
 TAHUN ANGGARAN 2006

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI BAGI HASIL BBNKB	KETERANGAN
1	2	3	4
	<b>KABUPATEN :</b>		
1	SEMARANG	6,418,595,000.00	
2	KENDAL	5,609,681,000.00	
3	DEMAK	5,538,202,000.00	
4	GROBOGAN	6,250,468,000.00	
5	PATI	7,197,769,000.00	
6	KUDUS	6,642,821,000.00	
7	JEPARA	6,849,178,000.00	
8	REMBANG	3,347,134,000.00	
9	BLORA	4,790,634,000.00	
10	PEKALONGAN	3,798,363,000.00	
11	BATANG	3,577,178,000.00	
12	PEMALANG	4,875,892,000.00	
13	TEGAL	5,328,282,000.00	
14	BREBES	6,699,597,000.00	
15	BANYUMAS	8,443,239,000.00	
16	CILACAP	8,782,086,000.00	
17	PURBALINGGA	3,781,072,000.00	
18	BANJARNEGARA	4,037,244,000.00	
19	MAGELANG	5,276,383,000.00	
20	TEMANGGUNG	3,168,283,000.00	
21	WONOSOBO	3,157,865,000.00	
22	PURWOREDJO	3,486,432,000.00	
23	KEBUMEN	4,196,394,000.00	
24	KLATEN	6,906,792,000.00	
25	BOYOLALI	5,117,113,000.00	
26	SRAGEN	5,833,205,000.00	
27	SUKOHARDJO	6,024,550,000.00	
28	KARANGANYAR	5,730,901,000.00	
29	WONOGIRI	4,879,187,000.00	
	<b>KOTA :</b>		
30	SEMARANG	32,834,116,000.00	
31	PEKALONGAN	2,526,598,000.00	
32	SURAKARTA	9,546,953,000.00	
33	SALATIGA	2,640,294,000.00	
34	TEGAL	2,564,600,000.00	
35	MAGELANG	2,192,899,000.00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>208,050,000,000.00</b>	

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO